



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.1.4/Kep. 493 - BKPSDM/2024  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

JABATAN KRITIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berdasarkan sistem merit serta pelaksanaan dari manajemen talenta bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Cirebon;  
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan jabatan kritikal sebagai posisi strategis dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jabatan Kritikal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 139);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 169 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 169);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 10);

14. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.7.6.1/Kep.1195-Dinsos/2023 tentang Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
15. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.8.3.1/Kep.73-BKPSDM/2024 tentang penetapan peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
16. Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 700/Kep-876-Sekrt/2021 tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Jabatan Kritisal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Jabatan Kritisal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan di Daerah Kabupaten Cirebon serta pembangunan nasional dengan memperhatikan sistem manajemen talenta, pengembangan kompetensi dan kualifikasi hasil pemetaan manajemen talenta serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemetaan manajemen talenta dan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Jabatan Kritisal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan atas dasar:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon;
  - b. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 7 Oktober 2024

PJ. BUPATI CIREBON



WAHYU MIJAYA

DAFTAR JABATAN KRITIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

| NO. | ESELON | BOBOT | PRESENTASE | SATUAN KERJA                    | NAMA JABATAN                                         |
|-----|--------|-------|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | II.A   | 5.00  | 100%       | SEKRETARIAT DAERAH              | SEKRETARIS DAERAH                                    |
| 2   | II.B   | 5.00  | 100%       | SEKRETARIAT DAERAH              | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT        |
| 3   | II.B   | 5.00  | 100%       | SEKRETARIAT DAERAH              | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM                            |
| 4   | III.A  | 5.00  | 100%       | SEKRETARIAT DAERAH              | KEPALA BAGIAN ORGANISASI                             |
| 5   | III.A  | 5.00  | 100%       | SEKRETARIAT DAERAH              | KEPALA BAGIAN HUKUM                                  |
| 6   | III.A  | 5.00  | 100%       | SEKRETARIAT DAERAH              | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN                           |
| 7   | III.A  | 5.00  | 100%       | SEKRETARIAT DAERAH              | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                   |
| 8   | III.A  | 5.00  | 100%       | SEKRETARIAT DAERAH              | KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA              |
| 9   | III.A  | 5.00  | 100%       | SEKRETARIAT DAERAH              | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN           |
| 10  | II.B   | 5.00  | 100%       | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA               |
| 11  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN                             |
| 12  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA      |
| 13  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | KEPALA BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA |
| 14  | II.B   | 5.00  | 100%       | DINAS PENDIDIKAN                | KEPALA DINAS PENDIDIKAN                              |
| 15  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS PENDIDIKAN                | KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR               |
| 16  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS PENDIDIKAN                | KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA    |
| 17  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS PENDIDIKAN                | KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI              |

| NO. | ESELON | BOBOT | PRESENTASE | SATUAN KERJA               | NAMA JABATAN                                                           |
|-----|--------|-------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 18  | IV.A   | 5.00  | 100%       | DINAS PENDIDIKAN           | KEPALA SEKSI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR            |
| 19  | IV.A   | 5.00  | 100%       | DINAS PENDIDIKAN           | KEPALA SEKSI SARANA, PRASARAN DAN DATA SEKOLAH DASAR                   |
| 20  | IV.A   | 5.00  | 100%       | DINAS PENDIDIKAN           | KEPALA SEKSI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| 21  | IV.A   | 5.00  | 100%       | DINAS PENDIDIKAN           | KEPALA SEKSI SARANA, PRASARAN DAN DATA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA        |
| 22  | IV.A   | 5.00  | 100%       | DINAS PENDIDIKAN           | KEPALA SEKSI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PAUD                     |
| 23  | IV.A   | 5.00  | 100%       | DINAS PENDIDIKAN           | KEPALA SEKSI SARANA, PRASARAN DAN DATA PAUD                            |
| 24  | II.B   | 5.00  | 100%       | DINAS KESEHATAN            | KEPALA DINAS KESEHATAN                                                 |
| 25  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS KESEHATAN            | KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN                                      |
| 26  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS KESEHATAN            | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN                                    |
| 27  | II.B   | 5.00  | 100%       | DINAS KETENAGAKERJAAN      | KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN                                           |
| 28  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS KETENAGAKERJAAN      | KEPALA BIDANG PENEMPATAN KERJA                                         |
| 29  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS KETENAGAKERJAAN      | KEPALA BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   |
| 30  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS KETENAGAKERJAAN      | KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL                                      |
| 31  | II.B   | 5.00  | 100%       | DINAS SOSIAL               | KEPALA DINAS SOSIAL                                                    |
| 32  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS SOSIAL               | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL                                      |
| 33  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS SOSIAL               | KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL                                      |
| 34  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS SOSIAL               | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                          |
| 35  | II.B   | 5.00  | 100%       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                      |

| NO. | ESELON | BOBOT | PRESENTASE | SATUAN KERJA                               | NAMA JABATAN                                                        |
|-----|--------|-------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 36  | III.B  | 5.00  | 100%       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT                   |
| 37  | II.B   | 5.00  | 100%       | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        | KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                          |
| 38  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        | KEPALA BIDANG SARANA DAN PELAKU DISTRIBUSI                          |
| 39  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        | KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGENDALIAN BARANG POKOK DAN PENTING |
| 40  | II.B   | 5.00  | 100%       | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        | KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN                                         |
| 41  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN       | KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN, KERAWANAN DAN DISTRIBUSI PANGAN         |
| 42  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN       | KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN                          |
| 43  | II.B   | 5.00  | 100%       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG        | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG                          |
| 44  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG        | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR                                       |
| 45  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG        | KEPALA BIDANG BANGUNAN GEDUNG                                       |
| 46  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG        | KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG                                        |
| 47  | II.B   | 5.00  | 100%       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                       |
| 48  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENATAAN HUKUM            |
| 49  | II.B   | 5.00  | 100%       | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                           |
| 50  | III.A  | 5.00  | 100%       | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN                |
| 51  | II.B   | 5.00  | 100%       | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    | KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH                                      |
| 52  | III.B  | 5.00  | 100%       | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    | KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN               |
| 53  | III.B  | 5.00  | 100%       | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN                  |
| 54  | III.B  | 5.00  | 100%       | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH                              |

| NO. | ESELON | BOBOT | PRESENTASE | SATUAN KERJA                                                      | NAMA JABATAN                                                                        |
|-----|--------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 55  | II.B   | 5.00  | 100%       | INSPEKTORAT                                                       | INSPEKTUR                                                                           |
| 56  | III.A  | 5.00  | 100%       | INSPEKTORAT                                                       | INSPEKTUR PEMBANTU                                                                  |
| 57  | II.B   | 5.00  | 100%       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                    | KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                               |
| 58  | III.B  | 5.00  | 100%       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                    | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                       |
| 59  | III.B  | 5.00  | 100%       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                    | KEPALA BIDANG ANGGARAN                                                              |
| 60  | III.B  | 5.00  | 100%       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                    | KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN                                                        |
| 61  | II.B   | 5.00  | 100%       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH            |
| 62  | III.B  | 5.00  | 100%       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH             |
| 63  | III.B  | 5.00  | 100%       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                           |
| 64  | II.B   | 5.00  | 100%       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                             |
| 65  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  | KEPALA BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA                                             |
| 66  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  | KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                       |
| 67  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  | KEPALA BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT                                |
| 68  | II.B   | 5.00  | 100%       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                            | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA                                           |
| 69  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                            | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT |
| 70  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                            | KEPALA BIDANG PENATAAN DA KERJA SAMA DESA                                           |
| 71  | III.B  | 5.00  | 100%       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                            | KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                        |

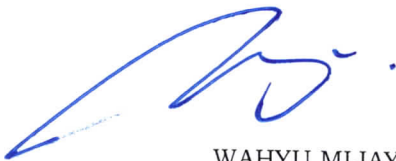
| NO. | ESELON | BOBOT | PRESENTASE | SATUAN KERJA                                                                                  | NAMA JABATAN                                                                                               |
|-----|--------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72  | II.B   | 5.00  | 100%       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                           | KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                 |
| 73  | III.B  | 5.00  | 100%       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                           | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN                                                                 |
| 74  | II.B   | 5.00  | 100%       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                        | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                              |
| 75  | III.B  | 5.00  | 100%       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                        | KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI                                                       |
| 76  | III.B  | 5.00  | 100%       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                        | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR                                                             |
| 77  | II.B   | 4.00  | 80%        | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSATAKAAN                                                             | KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSATAKAAN                                                                   |
| 78  | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSATAKAAN                                                             | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ARSIP                                                                            |
| 79  | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSATAKAAN                                                             | KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                 |
| 80  | II.B   | 4.00  | 80%        | RSUD ARJAWINANGUN                                                                             | KEPALA RSUD ARJAWINANGUN                                                                                   |
| 81  | II.B   | 4.00  | 80%        | RSUD WALED                                                                                    | KEPALA RSUD WALED                                                                                          |
| 82  | II.B   | 4.00  | 80%        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | KEPALA DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 83  | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUH DAN PENGGERAKAN                                              |
| 84  | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA                                     |
| 85  | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSTAMAAN GENDER                                             |

| NO. | ESELON | BOBOT | PRESENTASE | SATUAN KERJA                                                                                  | NAMA JABATAN                                                  |
|-----|--------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 86  | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN                 |
| 87  | II.B   | 4.00  | 80%        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                        | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 88  | II.B   | 4.00  | 80%        | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                      | KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               |
| 89  | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                      | KEPALA BIDANG USAHA MIKRO                                     |
| 90  | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                      | KEPALA BIDANG KOPRASI                                         |
| 91  | II.B   | 4.00  | 80%        | DINAS PERTANIAN                                                                               | KEPALA DINAS PERTANIAN                                        |
| 92  | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PERTANIAN                                                                               | KEPALA BIDANG PENYULUHAN                                      |
| 93  | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PERTANIAN                                                                               | KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN                  |
| 94  | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PERTANIAN                                                                               | KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                  |
| 95  | II.B   | 4.00  | 80%        | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                                                                     | KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                              |
| 96  | II.B   | 4.00  | 80%        | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                                                                     | KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN                                      |
| 97  | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                                                                     | KEPALA BIDANG OLAHRAGA                                        |
| 98  | II.B   | 4.00  | 80%        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN                                                          | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN                   |
| 99  | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN                                                          | KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP, PENGOLAHAN DAN PENGAWASAN    |
| 100 | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN                                                          | KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA                              |
| 101 | II.B   | 4.00  | 80%        | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANIAN                                             | KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANIAN      |
| 102 | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANIAN                                             | KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN                              |
| 103 | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANIAN                                             | KEPALA BIDANG PERUMAHAN                                       |

| NO. | ESELON | BOBOT | PRESENTASE | SATUAN KERJA                                            | NAMA JABATAN                                                                                               |
|-----|--------|-------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN PERMUKIMAN<br>DAN PERTANIAN | KEPALA BIDANG PERTANAHAN                                                                                   |
| 105 | II.B   | 4.00  | 80%        | DINAS PERHUBUNGAN                                       | KEPALA DINAS<br>PERHUBUNGAN                                                                                |
| 106 | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PERHUBUNGAN                                       | KEPALA BIDANG LALU LINTAS<br>DAN ANGKUTAN                                                                  |
| 107 | II.B   | 4.00  | 80%        | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL              | KEPALA DINAS<br>KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                                                       |
| 108 | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL              | KEPALA BIDANG PELAYANAN<br>PENDAFTARAN PENDUDUK                                                            |
| 109 | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL              | KEPALA BIDANG<br>PENGELOLAAN INFORMASI<br>ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN DAN<br>PEMANFAATAN DATA             |
| 110 | II.B   | 4.00  | 80%        | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK                    | KEPALA BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK                                                                |
| 111 | III.B  | 4.00  | 80%        | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK                    | KEPALA BIDANG POLITIK<br>DALAM NEGERI DAN<br>ORGANISASI<br>KEMASYARAKATAN                                  |
| 112 | III.B  | 4.00  | 80%        | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK                    | KEPALA BIDANG BINA<br>IDEOLOGI, WAWASAN<br>KEBANGSAAN DAN<br>KETAHANAN EKONOMI,<br>SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA |
| 113 | II.B   | 4.00  | 80%        | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN          | KEPALA DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN                                                      |
| 114 | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN          | KEPALA BIDANG<br>PENCEGAHAN                                                                                |
| 115 | III.B  | 4.00  | 80%        | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN          | KEPALA BIDANG<br>PEMADAMAN, PENYELAMATAN<br>DAN SARANA PRASARANA                                           |
| 116 | -      | 3.00  | 60%        | UPT PUSKESMAS                                           | KEPALA UPT PUSKESMAS                                                                                       |
| 117 | III.A  | 3.00  | 60%        | KECAMATAN                                               | CAMAT                                                                                                      |
| 118 | IV.A   | 2.00  | 40%        | KECAMATAN                                               | KEPALA SEKSI<br>PEMERINTAHAN                                                                               |
| 119 | IV.A   | 2.00  | 40%        | KECAMATAN                                               | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN UMUM                                                            |

| NO. | ESELON | BOBOT | PRESENTASE | SATUAN KERJA | NAMA JABATAN                     |
|-----|--------|-------|------------|--------------|----------------------------------|
| 120 | IV.A   | 2.00  | 40%        | KECAMATAN    | KEPALA SEKSI PELAYANAN<br>PUBLIK |

PJ. BUPATI CIREBON



WAHYU MIJAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon (0231) 320819 Fax. (0231) 320819  
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/> email: [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
Sumber - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 17 September 2024  
Nomor : 800.1.3.3 /ND. 168 - PKK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Jabatan Kritisal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka untuk menyelenggarakan manajemen karier berdasarkan sistem merit serta pelaksanaan dari manajemen talenta bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Cirebon serta untuk mendukung pelaksanaan manajemen talenta dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan jabatan kritisal sebagai posisi strategis dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Jabatan Kritisal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum, dimohon untuk perkenannya menandatangani Keputusan Bupati tersebut dan kami sampaikan terimakasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon (0231) 320819 Fax. (0231) 320819  
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/> email: bkpsdm@cirebonkab.go.id  
Sumber - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 17 September 2024  
Nomor : 800.1.3.3 /ND. 168 - PKK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Jabatan Kritis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka untuk menyelenggarakan manajemen karier berdasarkan sistem merit serta pelaksanaan dari manajemen talenta bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Cirebon serta untuk mendukung pelaksanaan manajemen talenta dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan jabatan kritis sebagai posisi strategis dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Jabatan Kritis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum, dimohon untuk perkenannya menandatangani Keputusan Bupati tersebut dan kami sampaikan terimakasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

#

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001

